

Notulensi
Pertemuan Multipihak Rencana Pelaksanaan
Major Project Pengelolaan Terpadu UKMM Tahun 2022 di Provinsi Aceh

Tanggal	24 Agustus 2021	Waktu	13.00 – 16.00 WIB
Judul Kegiatan	Pertemuan Multipihak Rencana Pelaksanaan <i>Major Project</i> Pengelolaan Terpadu UKMM Tahun 2022 di Provinsi Aceh	Tempat	<i>Virtual Meeting</i> melalui Aplikasi Zoom

SESI PEMBUKA DAN PAPARAN NARASUMBER

I. Pembuka oleh Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi, Bappenas – Bapak Ahmad Dading Gunadi

- *(terlampir bahan paparan)*

II. Penyampaian Progres Penyiapan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM oleh Asdep Pengembangan Kawasan Rantai Pasok UKM, Kemenkop UKM – Bapak Ari Anindya Hartika

- *(terlampir bahan paparan)*

III. Penyampaian Gambaran Komoditas Nilam, Ketua Atsiri Research Center (ARC) Unsyah – Bapak Syaifullah Muhammad

- *(terlampir bahan paparan)*
- Komoditas Nilam saat ini di Aceh belum bisa memiliki nilai tambah lebih. Kebanyakan diekspor langsung ke Singapura kemudian dibeli lagi oleh industri-industri di dalam negeri. Tidak ada proses purifikasi yang dilakukan oleh petani Nilam di Aceh untuk menjadi produk turunannya
- Mesin bantuan BPPT di ARC sudah dioptimalkan bentuk purifikasi minyak nilam sehingga minyak bisa digunakan sebagai produk turunan lainnya.
- Harga harga minyak nilam biasa dari masyarakat sekitar Rp600.000 ketika di purifikasi dengan kadar patchouli alkohol 60% bisa dijual dengan harga Rp6.000.000 1 kg, proses selanjutnya menjadi pacar kristal dengan harga per gramnya Rp150.000 (1 kilo 15 juta rupiah) ini perlu disentuh supaya nilai tambah bisa ada di Aceh dan dinikmati masyarakat.
- Secara tidak langsung produk turunan Nilam menciptakan ekosistem usaha baru yang makin banyak dan usaha/industri yang memerlukan Nilam dari Aceh. Sejauh ini ARC sudah melatih anak untuk komoditas Nilam
- Kebutuhan makin bertambah sehingga pembeli Nilam Aceh semakin banyak tidak tergantung pada pasar di Medan dan Singapura.
- Dari 23 kabupaten ada 12 kota yang berpotensi di nilam ini, ada 16 kabupaten yang sudah mulai memiliki komoditas nilam yang dikembangkan. Pertanian nilam selama ini hanya mengandalkan hujan pengairannya, satu hektar investasi sekitar 10 juta untuk instalasi

air tapi bagi masyarakat itu nilai nominal yang besar. Sisi hulu perlu intensifikasi tanah sebab pada isu internasional jika harus berpindah merusak hutan, itu tidak disukai oleh konsumen internasional dampaknya komoditas kita akan ditolak di internasional

- Kapasitas produksi Nilam termasuk masih lemah perlu ada pabrik skala besar supaya bisa ekspor. Perlu ada sentuhan supaya bisa mengeksport bukan hanya minyak nilam tapi juga produk turunan dari Nilam tersebut supaya nilai tambahnya lebih besar
- Pernah ada perusahaan Arun yang mengembangkan Nilam di Aceh namun sifatnya eksklusif sehingga masyarakat tidak memiliki Inovasi dan tetap miskin untuk khususnya kawasan Kabupaten Aceh Utara. Maka inovasi harus inklusif, penta helix harus berjalan
- Perlu support sisi ilmu pengetahuan untuk pengembangan nilam kedepan dimana ARC sebenarnya sudah mendukung melalui beberapa inovasi yang diberikan dan secara gratis
- Dari dulu sampai sekarang harga Nilam konstan sekitar Rp500.000 per kg. 1 hektar menghasilkan 1 Kg minyak sekitar 100 juta per hektar, maka keuntungan petani 70 juta sehingga keuntungan perbulan sekitar 8 juta, tentu ini berguna untuk mengangkat Angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh
- Koperasi Innova sekarang mampu memproduksi 2-ton handsanitizer perhari produksi yang dapat izin edar dari Kemenkes
- Sisi teknologi sudah bagus namun cara berjualannya masih kurang dan perlu diperkuat oleh pemerintah pusat khususnya kementerian

SESI TANGGAPAN, DISKUSI, DAN TANYA JAWAB

Dinas Koperasi dan UKM Prov. Aceh

- Teknologi bukan masalah di kampus ARC, namun memang cara berjualan atau berbisnis masih yang perlu diintervensi
- Adanya jaringan internasional ini harus menjadi fokus ke depan untuk bisa dimanfaatkan menyerap produk Nilam Aceh ini. *Major Project* harus menghasilkan nilai tambah berkelanjutan khususnya di komoditas Nilam di daerah kami ini. Sampai dengan hari ini harga Nilam khususnya yang kami pantau di Innova tidak kurang dari Rp600.000 apalagi dengan adanya nilai tambah baru bisa lebih dan ini akan lebih bermanfaat

BPPSDMP, Kementan (Ibu Mena)

- BPPSDMP Kementan lebih menekankan kepada intervensi kelembagaan pertaniannya, lebih kepada pengembangan ekonomi pertanian (ada di Kabupaten Aceh Besar) sebagai penghasil utama nilam
- Sejauh ini Kementan khususnya BPPSDMP belum memegang data kelembagaan ekonomi petani Nilam di Aceh sebagaimana koordinasi dengan dinas pertanian dan perkebunan provinsi Aceh yang dilakukan Kementan, termasuk data UMKM yang bergerak tidak komoditas Nilam ini sampai saat ini masih dalam tahap identifikasi, termasuk bentuk kelembagaan ekonomi petani yang bergerak di komoditas nilam baik on farm maupun off farm
- Terkait kegiatan Kementan mengenai wirausaha muda pertanian kegiatan ini ada di pusat pendidikan pertanian diperkirakan lokasi Aceh belum ada, nanti bisa diusulkan kembali lokasinya dari internal kami untuk mendukung MP ini dan akan didiskusikan kembali dari program ataupun rencana di pusat pendidikan pertanian mengingat kegiatan wirausaha

muda ini ada di kegiatan ada di program pendidikan penguatan pematapan pendidikan pertanian

Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Bappenas

- Apakah ada bantuan untuk memperkuat bibit unggul terkait nilam dari Kementerian Pertanian
- Selanjutnya mengenai kelembagaan petani, untuk memperkuat kelembagaan misal dalam pengolahan ataupun budidaya, karena Kementan dalam sektor Hulu, jika ada hal terkait ini bisa dimasukkan untuk mendukung MP ini

Bapak Ari, Asdep Pengembangan Kawasan Rantai Pasok UKM, Kemenkop UKM

- Dari Kementan sedianya bisa mendukung dari sektor hulu misalkan dalam bibit ataupun bahan baku dan beberapa aspek lain di sektor hulu

Pak Syaifullah, Ketua ARC

- Kementan bisa mendukung dari instalasi air misalnya, supaya petani bisa tetap berproduksi. Kedua infrastruktur untuk pembuatan kompos dari hasil penyulingan limbah nilam, supaya sisa limbah bisa dikembalikan ke tanah dan ini memerlukan rumah kompos, perlu dibangun dengan mesin pencacah, dan juga tentunya kelembagaan, supaya menjadi unit bisnis tersendiri supaya bisa jualan pupuk organik tidak hanya kepada petani Nilam tapi juga petani petani sekitarnya. Kemudian apakah mungkin dibuat semacam program kebun induk supaya bisa disertifikasi karena pengadaan bibit pemerintah harus bibit yang tersertifikasi sementara untuk dapat bibit sertifikasi harus ada pada kebun induk
- Kemudian Apakah mesin penyaringan ini bisa di provide oleh Kementan, pengadaan mesin harus sudah dengan inovasi, jangan hanya mesin penyulingan berbasis drum bekas. Mohon bantuan itu masuk ke modernisasi supaya kualitas produk yang dihasilkan bisa setara dengan misal petani Thailand Cina dan lain-lain yang sudah berdaya saing.

BPPSDMP, Kementan (Ibu Mena)

- Terkait benih atau atau sarpras unit produksi, atau prasarana di on farm bisa ditindaklanjuti lanjuti atau menghubungi Dirjen perkebunan, eselon 2 ada di bagian tanaman penyegar
- Terkait infrastruktur bisa menghubungi atau dikerjasamakan dengan Dirjen prasarana dan sarana pertanian atau Dirjen PSP, termasuk benih, kebun induk, sertifikasi kebun induk tersebut bisa menghubungi Dirjen perkebunan.
- Untuk mesin penyulingan bukan menjadi bagian Kementan ini menjadi bagian kemenperin core Kementan adalah di sektor hulu atau on farm-nya
- Bpsdm pertanian lebih ke pelaksanaan mandat untuk aspek penyuluhan SDM pertanian, pendidikan vokasi, pelatihan, penyuluhan. Sedianya kedepan juga pendidikan vokasi kami sepertinya akan mengakomodir khusus untuk komoditas Nilam ini karena mengingat potensi yang besar sebagaimana disampaikan narasumber
- Pengembangan pertanian memang tergantung dari arah kebijakan Kementan, tergantung programnya sehingga komoditas di Dirjen perkebunan itu apakah Niam masuk komoditas atau tidak itu tergantung, sehingga apa yang dilaksanakan di 2021 maupun 2022. Kita mengikuti komoditas utama yang akan dikembangkan di Kementerian Pertanian. Jika dilihat dari rancangan kerja di 2022 untuk perkebunan ada beberapa kegiatan utama misal pengaruh logistik benih unggul melalui pembangunan kebun benih ada pengembangan

perkebunan unggul berbasis korporasi untuk komoditi kopi Kakao kelapa dan tebu namun ini masih perlu dikonfirmasi ke Dirjen bersangkutan Apakah Nilam masuk komoditas atau tidak

- Direktorat UKM Bappenas akan membuat surat secara resmi kepada Kementan, untuk ditembuskan ke Direktorat Pangan Bappenas terkait usulan yang sudah ditagih dan usulan lainnya yakni tambahan dari usulan-usulan yang sudah masuk sebagai opsi untuk membantu di lapangan.

Ibu Fitri, Biro Perencanaan Kementan

- Terkait nilam sudah dicek, ternyata untuk major project di Dirjen perkebunan nilai belum masuk, untuk di Aceh ada kopi saja komoditasnya. Sedangkan untuk program kawasan juga Nilam belum masuk di Kementan sebagaimana kepmentan 472, jadi jika pun ada penganggaran, maka akan masuk ke anggaran reguler tidak masuk ke program yang khusus atau anggaran terkait kawasan
- Pada Dirjenbun sebenarnya sudah ada banyak kegiatan/program untuk menanggulangi masalah-masalah dari sisi on farm seperti halnya tadi yang dimention misal terkait bibit, lahan, teknis budidaya, pengairan dll, ada pada Direktorat Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Pertanian. Untuk terkait perkebunan ini lebih tepat agar bisa menghubungi dirjenbun dengan beberapa Direktorat yang terkait dibawahnya.
- Untuk masalah pengairan bisa menghubungi Dirjen PSP. Bisa juga dalam pengembangan Major Project atau terkait pengembangan kawasan pertanian, di Kementan biasanya leadernya ada di Dirjen sektor masing-masing dengan subsektornya dan biasanya akan diintegrasikan juga dengan seluruh Eselon 1 terkait lintas K/L.
- Kepmenpan 472 itu tidak kaku dan daerah bisa mengusulkan kembali komoditas yang dianggap strategis di daerah supaya bisa diusulkan ke pusat. Apabila ada usul perubahan terkait kawasan dari daerah maka usulnya akan kami tampung. Namun usulan harus dari dinas pertanian daerah karena yang mengampu di lapangan adalah mereka, misal usulan kawasan tersebut akan diangkat ke nasional, atau jika tidak bisa masuk ke kawasan prioritas provinsi, atau jika tidak bisa, maka masuk ke kawasan prioritas kabupaten.

Dinas Koperasi dan UKM Prov. Aceh

- Nilam sudah menjadi fokus komoditas dinas pertanian di Aceh, nanti Bappeda akan berperan mengoleksi menjadi satu kesatuan langkah ke depan seperti apa, supaya untuk komoditi Nilam ini bisa dikembangkan dari hulu hilirnya.
- Dinkop akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Dinas Pertanian untuk bisa mengusulkan sebagaimana disampaikan Kementan, namun Kementan ataupun Kementerian lainnya diharapkan ada partisipasi untuk bisa keroyokan supaya bisa mencapai target pembangunan
- Untuk Major Project ini perlu ada semacam surat dari Bappenas, misal Menteri turun ke gubernur sehingga Gubernur akan menurunkan ke seluruh dinas untuk bisa bergerak lebih cepat untuk setiap terkait secara langsung atau keseluruhan, supaya koordinasi kami di lapangan akan lebih mudah

Ibu Lusiana, Biro Perencanaan Kemenperin

- Dari sisi IKM, biasanya untuk terkait dengan standar bahan baku Nilam yang digunakan untuk menghasilkan nilam yang sesuai dengan standar yang diinginkan (terkait standarisasi minyak nilam) biasanya kami akan mengarahkan untuk memfasilitasi sarana

produksi melalui program restrukturisasi permesinan IKM. Namun 2022 IKM ini sifatnya tematik, tidak bisa secara langsung daerah untuk mengusulkan kegiatan terkait mesin peralatan karena kebijakan tersebut.

- Bentuk restrukturisasi permesinan dari kemenperin sifatnya reimburse antara 25 sampai 30% yang bisa di cover biayanya untuk pembelian mesin peralatan. Selain itu kami ada juga kegiatan bimbingan terkait standarisasi, maka bisa juga untuk minyak nilam yang dihasilkan ini. Untuk mengetahui seperti apa standar minyak nilam ini, bisa juga mengakses program kemitraan link and match yang ada di IKM, dimana supplier dipertemukan dengan para IKM yang memproduksi, Kemudian dari sana kita bisa tahu bagaimana standar yang dibutuhkan oleh industri.
- Untuk kebutuhan mesin penyulingan mengenai RO/kegiatan yang tersedia di Kementerian, kami masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dirjen IKMA, apakah bisa diampu melalui restrukturisasi permesinan atau skema lainnya, melalui proposal yang diajukan kepada kemenperin dari dinas yang membidangi industri. Proposal diharapkan masuk tahun ini karena agar bisa diimplementasikan untuk Tahun 2022. Mohon agar dinas dapat aktif berkoordinasi dari sekarang biar secara teknis lebih jelas dan aturan apa saja yang dilengkapi bisa difokan dari sekarang

Pak Syaifullah, ARC

- Pertama kita butuh mesin penyulingan dari daun menjadi minyak dengan bahan stainless steel dan dengan sistem boiler yang hemat energi. Ada juga kebutuhan lain agar industri masyarakat bisa terselamatkan, karena 90% alat alat penyulingan yang ada saat ini masih menggunakan drum. Sejauh ini kita hanya menyediakan mesin babbling proses yaitu untuk menyuling minyak dari drum tersebut.
- Bagi anak-anak muda pelaku UMKM yang sudah memproduksi produk turunan, perlu alat-alat sederhana misal alat pencampur, matic stir, alat pengaduk dan lain-lain. Dengan ruang produksi bersama nantinya ada peluang untuk adanya semacam instalasi yang bisa digunakan secara bersama-sama supaya (misal) kemasannya bagus dan lain-lain

Ibu Lusiana, Biro Perencanaan Kemenperin

- Fasilitas sarpras dari kemenperin hanya diperuntukkan bagi unit ikm, ini supaya tidak tumpang tindih dengan K/L lain.
- Mungkin juga cukup ideal apabila kebutuhan sarpras ini bisa dicukupi oleh pihak Kementerian Koperasi karena untuk DAK IKM sekarang ini terbatas untuk wilayah tematik

Ibu Lia, Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas

- Alokasi DAK pada tahun 2018 dan 2019 sudah ada di Aceh untuk nilam, namun rincian pembangunannya hanya gedung saja tidak ada menu mesin peralatan. Pada tahun 2022 untuk Nilam ada usulan di Kabupaten Aceh Jaya saat ini prosesnya masih dalam sinkronisasi dan harmonisasi, namun tidak mengajukan mesin peralatan, baru mengajukan pematangan lahan dan pengajuan gedung produksi IPAL dan IPA. kedepan perlu diarahkan bahwa dinas membidangi industri agar mengusulkan misal restrukturisasi mesin dan peralatan atau pengadaan yang terkait dengan peralatan pengolahan nilam melalui mekanisme DAK ini
- Bentuk kegiatan restrukturisasi ini mekanismenya adalah cost-sharing.
- Mekanismenya daerah mengajukan proposal kepada Dirjen IKMA. mohon aktif berkoordinasi mulai dari sekarang.

- Pengajuan dilakukan bagi IKM yang sudah memiliki NIB. Mekanisme pembiayaan adalah sebesar 25 sampai 40% yang bisa ditanggung oleh kemenperin tergantung harga mesin itu sendiri berapa.
- Ada juga kegiatan terkait kemitraan dan sertifikasi yang dilakukan oleh kemenperin, ini bisa memperkuat salah satu aspek nilai terkait dengan ekspor produk.
- DAK non Fisik IKM dialokasikan kepada Kab Aceh Jaya

Pak Syaifullah, ARC

- Untuk ekspor, yang paling perlu dibantu adalah connecting ke entitas bisnis di luar negeri, atau market secara umum, karena setiap proses pada ujungnya adalah siapa pihak yang akan membeli produk yang dihasilkan oleh kita ini saat. Perlu bantuan sebenarnya siapa yang mampu menyerap produk kami. Sudah banyak pameran yang sudah kami laksanakan seperti dengan forum bisnis di Australia dan lain-lain.
- Sertifikasi penting, rata-rata IKM saat ini tidak punya sertifikat BPOM, izin edar, ataupun izin lainnya.
- Melalui factory sharing ini apakah ini memungkinkan ada semacam fasilitas yang bisa digunakan secara bersama.
- Sejauh ini perizinan sangat sulit dan waktu itu kami bisa mendapat izin karena difasilitasi oleh istri gubernur. Meskipun sudah ada sistem OSS namun pada implementasinya sangat rumit bagi pelaku usaha untuk mendapatkan NIB dan beberapa izin lainnya. Kita harus berulang-ulang datang ke notaris dan lain-lainnya untuk mengurus izin.
- Untuk hal semacam ini perlu ada semacam sosialisasi supaya para pelaku UMKM bisa tahu dan tidak membuat frustrasi bagi mereka, mohon forum ini bisa dibantu khususnya untuk pengembangan nilai ini, karena produknya masuk ke berbagai macam klaster, misal ada ke kosmetik, parfum, dan lain-lain
- Kesulitan mendapat spesifikasi yang diinginkan oleh dunia industri, dan ini perlu difasilitasi oleh pemerintah. Misal komposisi parfum di Prancis harusnya seperti apa, sehingga IKM kita bisa dilatih atau difasilitasi oleh Kementerian untuk mengembangkan produk, sehingga pelaku UMKM ini bisa mendapatkan pangsa pasar produk sesuai dengan karakter produk yang dibutuhkan itu seperti apa di pasar.
- Hal demikian bisa difasilitasi dengan cara mempertemukan pihak industri besar tentu dengan fasilitasi oleh pemerintah. Kemudian IKM kecil ini bisa menjadi adik angkat atau anak angkat mereka melalui sebuah forum tersebut

Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Bappenas

- Terkait potensi intervensi oleh KUKM yang diusulkan kemenperin, perlu diklarifikasi dan dikoordinasikan kembali oleh pihak kementerian koperasi misal dalam sertifikasi atau pemberian bantuan, supaya tidak tumpang tindih dengan bantuan ataupun program dari kementerian yang lain

Bapak Ari, Asdep Pengembangan Kawasan Rantai Pasok UKM, Kemenkop UKM

- IKM bagian dari UMKM, hanya saja klasifikasi usahanya berbeda ada di sektor industri. Apa yang dibutuhkan sudah sesuai dengan yang disampaikan pak Syaifullah, misal sertifikasi standarisasi dan lainnya. Harapan kami ada juga kontribusi ataupun peran dari kemenperin ataupun Kementerian lainnya juga dalam implementasi kedepannya.

- Perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan daerah misalkan Aceh ini koordinatonya oleh bappeda ataupun Dinas Koperasi, untuk mengkoordinasikan dengan dinas lainnya sehingga misalnya ketika ada kebutuhan dari sektor industri maka Dinas Perindustrian bisa mengajukan

Ibu Lusiana, Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian

- Terkait program kemitraan (link and match) di kemenperin, sebenarnya kami melalui Ditjen Ikma terus berupaya untuk meningkatkan daya saing IKM melalui program tersebut salah satunya melalui fasilitasi pertemuan IKM dan industri besar melalui program pertemuan ini untuk lebih jelas mohon koordinasi lebih lanjut Ke Dirjen IKMA.
- Juga kami mohon dari Dinas Perindustrian aktif berkoordinasi dengan Dirjen IKMA untuk teknis dan prosedurnya seperti apa

Ibu Lia, Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas

- Mohon usulan bisa ditindaklanjuti oleh dinas industri dan berkoordinasi dengan Dirjen IKMA dan lebih baik segera mengajukan proposal terkait usulan tersebut sehingga kemenperin bisa memutuskan apakah intervensinya akan lebih mengutamakan di mesin restrukturisasi atau sertifikasinya. Proposal ini bisa memuat ketiga hal ini Baik restrukturisasi, sertifikasi, ataupun peralatannya

Dinas Koperasi dan UKM Prov. Aceh

- Hasil ini akan ditindaklanjuti, namun kami perlu legal standing yakni surat dari Bappenas. Ini karena akan menjadi PR besar besar yang perlu keroyokan sehingga jelas siapa mengerjakan apa dan program yang dihasilkan bisa lebih efektif dalam waktu yang singkat
- Disamping rumah produksi ada permasalahan di rumah packaging, sehingga menjadi kendala ketika mengajukan legalitas usaha, akibatnya banyak aspek legal yang sulit diperoleh karena aspek teknis di lapangan tidak bisa dipenuhi oleh pelaku UMKM
- Rumah produksi ini walaupun tidak menjawab keseluruhan masalah namun setidaknya bisa menyelesaikan beberapa masalah sehingga pengembangan komoditas ini kedepan bisa lebih baik
- Aspek packaging di daerah lebih sulit karena ongkosnya bisa dua kali lipat sehingga harga produk kami sulit bersaing dengan bandung-surabaya ataupun daerah kota besar lainnya sehingga apabila ada rumah kemasan di daerah mungkin bisa lebih membantu.

Ibu Lia, Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas

- Rumah kemasan tidak ada RO/Kegiatan khusus tapi masuk di kegiatan DAK, untuk Aceh Tahun 2022 berdasarkan usulan ada di Kab. Aceh Jaya, sudah masuk usulan terkait rumah kemasan namun ini masih menunggu hasil konfirmasi penilaian, apakah rumah produksi dan rumah kemasan diajukan kedua-duanya atau hanya salah satu saja

Pak Rozak, Direktorat P2DN Kemendag

- Pada intinya kami mendukung program major project ini, di Direktorat kami ada beberapa kegiatan yang sedianya bisa mendukung usaha peningkatan akses pasar dan juga kewirausahaan. Di aspek akses pasar Kemendag memiliki kegiatan terkait kemitraan, dimana kegiatan ini merupakan mempertemukan UMKM dengan ritel atau dengan perusahaan besar atau perhotelan. Dengan Accor Group kami sebelumnya sudah

menjalin MoU terkait kemitraan dengan perhotelan terkait pemasok kebutuhan sandal hotel

- Semisal produk nilam ini cocok dengan ada yang di hotel Accor Group maka kami bisa memfasilitasi melalui kemitraan ini atau misal kami memfasilitasi dalam penjualan online-nya untuk bisa mendatangkan beberapa marketplace yang ingin atau yang bisa bekerja sama sehingga akses pemasaran dari produk Nilam bisa lebih meningkat ataupun dapat dikenal lebih luas lagi
- Ada juga terkait dengan kewirausahaan yakni untuk memberikan pemahaman kepada UMKM mengenai pentingnya sertifikasi atau standarisasi kemasan, sehingga produk mereka dapat bersaing dengan standar yang produk yang ditentukan
- Terkait kegiatan bantuan sarana usaha sejauh ini belum ada keterkaitan langsung dengan Nilam Aceh karena Bentuk bantuan sarana usaha perdagangan di Tahun 2022 ini berupa perbaikan warung ataupun toko ataupun kelontong ataupun pesantren mart.

Pak Syaifullah, Ketua ARC

- Terkait link and match dengan e-commerce atau Hotel sebenarnya produk turunan nilam sangat potensial, misalnya pihak hotel dapat bekerjasama dengan unit IKM untuk memproduksi sabun yang berbasis Nilam ini, untuk sisi teknologinya bisa kita provide (ajarkan) dan produknya bisa dibeli pihak hotel
- Digital marketing juga penting karena selama ini anak-anak muda kami banyak jualan di Instagram atau praltofm lainnya namun skalanya masih sangat, misalnya setelah 1 tahun tidak ada perubahan skala usahanya, hanya sekedar menjual beberapa unit saja. Skema efektif bagaimana menciptakan lompatan katak ini perlu dilakukan supaya mereka si pelaku usaha ini bisa lebih banyak menjual produk mereka.
- Bisa juga ada skema misal, pemerintah juga ada konsesi dengan dinas tertentu atau destinasi tertentu untuk pemasok barang. Namun memang tidak mudah karena berdasarkan pengalaman, UKM di tingkat kita untuk memasok ke kantor dinas itu pada akhirnya tidak bisa dilakukan karena tidak ada keberpihakan pemerintah, karena pengadaan barang sudah punya channel masing-masing, serta mereka ada komisi terkait pengadaan tersebut sehingga perlu ada afirmasi terkait hal ini terutama dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah ini.
- Bagaimana caranya terkait hal ini, maka kementerian bisa saja melakukan langkah misal melalui programnya yang ada saat ini, maka produk-produk ini bisa diserap pasar di kelompok dinas terkait melalui pengadaan
- kampanye belilah produk lokal Tidak Efektif karena kebanyakan pengadaan barang itu lebih memilih barang dari Jakarta karena harga lebih murah dan dapat komisi. Ini menjadi semacam lingkaran setan dan perlu diintervensi oleh pemerintah.

Pak Rozak, Direktorat P2DN Kemendag

- Sebagaimana mekanisme kerjasama dengan Accor Group untuk penyediaan sandal ke hotel-hotel di bawah naungan Accor, maka untuk produk turunan Nilam seperti yang diusulkan tadi sebagaimana disampaikan Pak Saepulloh bisa saja kami fasilitasi untuk diintervensi melalui kegiatan kemitraan yang ada di kami, informasi ini akan disampaikan kepada pimpinan kami untuk ditindaklanjuti. Pelaksanaan kegiatan ataupun terkait kegiatan/RO juga akan kami konfirmasi lebih lanjut dan akan disampaikan kepada pimpinan terlebih dahulu

Ibu Desi, Direktorat Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional (PIKEI), Bappenas

- Menanyakan mengenai apakah skala produksi yang ada saat ini sudah besar? Apakah masuk ke skala bisnis yang mana? Mengingat sejauh ini belum ada bisnis besar yang masuk ke Aceh, sehingga yang nantinya mereka (si perusahaan besar ini) bisa membantu untuk mengembangkan Nilam ini kedepannya berdasarkan permasalahannya yang ada saat ini.
- Apakah memungkinkan skema nilam ini untuk bisa direplikasi di daerah lain, karena sejauh ini saya lihat di Aceh sudah cukup berhasil

Pak Syaifullah, Ketua ARC

- Terkait unit bisnis memang banyak di Aceh, namun yang mereka lakukan adalah hanya trading saja, jadi hanya membeli minyak dari masyarakat dan mengekspor langsung, hanya ada sekitar satu sampai dua unit usaha saja yang melakukan pembinaan community development nya
- Stabilitas harga memang rentan terkadang, terutama harga yang normal dan layak di tingkat petani, maka kami mencoba menciptakan ekosistem baru dengan Ekosistem Blue Ocean, yaitu dengan skema mengembangkan produk turunan dan intermediaries-nya melalui bisnis yang masih kecil-kecil (pelakunya oleh anak muda). Kami sudah mencoba bertemu dengan Wardah namun memang tidak mudah untuk bisa menggunakan produk nilam ini untuk kosmetik mereka yang sudah berjalan selama ini, dan perlu banyak pembicaraan terlebih dahulu.
- Cukup banyak memang pengusaha/bisnis dari berbagai negara misal Inggris, Prancis, atau Amerika yang memiliki usaha di nilam ini, namun kantor dan operasional mereka ada di Jakarta atau Medan saja, di Aceh hanya perpanjangan tangan saja. Maka dengan cara tradisional ini nilai tambah yang dapat masyarakat masih kecil sehingga harganya masih merugikan petani. Harga tercipta nantinya akan melalui tahap berlapis-lapis dengan melalui para perantara sehingga masyarakat hanya dapat sekitar 200-300 ribu per kilogram saja
- Terkait replikasi bisa saja dimanapun, dan sudah banyak yang menjajaki kerjasama, misal dari Sulawesi atau Sumatera Utara atau Jawa juga banyak dan sudah banyak tawaran untuk berbisnis dan kerjasama. Namun hambatannya ada pada pentahelix memerlukan orang yang mau full dan fokus menghubungkan pemerintah karena hubungan baik dengan pemerintah itu memang cukup sulit, terutama masih terdapat banyak ego sektoral. Replikasi bisa dilakukan perlu ada leader yang satu fokus di depannya.
- ARC pada awalnya tidak menyentuh level bisnis, hanya sebatas penelitian saja namun pada akhirnya harus menyentuh hulu-hilir karena dari sisi pengetahuan saja ataupun penelitian saja tidak cukup khususnya untuk ikut mengembangkan perekonomian masyarakat. ARC juga membuat koperasi karena ketika mengajak koperasi dari luar untuk kerjasama itu komunikasinya cukup sulit, kita juga membuat perusahaan dibawah koperasi supaya menghindari susahnya komunikasi dengan perusahaan di luar.
- Konsep Blue Ocean kita kembangkan untuk menghindari konsep Red Ocean, Red Ocean lebih banyak mengorbankan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis karena Nilam ini adalah multimillion bisnis dengan keuntungan cukup besar namun masyarakat tidak memperoleh peningkatan kesejahteraan atau keuntungan yang lebih besar dari harga yang tinggi ini.

Ibu Desi, Direktorat Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional (PIKEI), Bappenas

- Apakah ada hambatan dari sisi misal investasi, kemudahan investasi, atau sisi tenaga kerja atau posisi apalagi, sehingga mereka usaha besar ini bisa mengolah dulu produk nilamnya dan tidak hanya membeli langsung karena potensi dari (misal) Perancis ataupun beberapa negara lainnya cukup besar di Aceh, sebagaimana disampaikan ARC.

Pak Syaifullah, Ketua ARC

- Salah satunya adalah resiko di farming yang cukup tinggi karena berhadapan dengan kultur setempat sehingga investasinya besar dan jarang pengusaha mau melakukan investasi ini karena resikonya tinggi. Mereka tidak ada contoh farming modelnya, seperti apa gamabran dan mekanismenya dan hal ini perlu ditangani melalui skema yang modern tentunya supaya mendapatkan hasil yang lebih baik
- Selama ini memang trading adalah hal yang paling simpel di mana ada barang ada uang dan tidak petani tidak mau menjalani berbagai kerumitan di lapangan, hal ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan berlarut karena dari pertanian lah mereka sejauh ini hidup meskipun skalanya masih sangat kecil
- Satu sisi kebutuhan Nilam cukup besar sehingga hal ini perlu dioptimalkan melalui potensi yang kita miliki saat ini dari berbagai sumber daya yang ada.
- Dulu Aceh mampu memasok 70% Nilam dunia sekarang hanya sekitar 20% saja. Seluruh Nilam Aceh sudah ada pihak yang siap beli sehingga perlu adanya ekstensifikasi lahan. Untuk sisi teknologi air, ARC siap membantu. Sejauh ini sudah ada kerjasama dengan Perancis untuk membuka lahan di Bener Meriah sebanyak 50 hektar.
- Perusahaan besar sekelas Givaudan memindahkan pabrik Nilam mereka ke sulawesi dari Aceh termasuk sisi hulunya, karena adanya konflik berkepanjangan di Aceh dan ini sangat merugikan. Maka perlu kita Sampaikan ke masyarakat internasional bahwa Aceh saat ini adalah kondisi yang sangat aman.
- Dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat siap mendukung. Dari sisi ini pemerintah perlu sounding/menyampaikan kepada masyarakat internasional, mengingat kami sangat terbatas jangkauannya/jaringannya di lapangan.
- Terkait kapasitas saat ini produksi kita cukup kapasitas nya, sudah lumayan meningkat. Peta kebutuhan dalam dunia sekitar 2.600 ton per tahun, yang bisa dipenuhi oleh dunia hanya 1.600 ton, dan hanya 1.500-ton yang bisa dikirim dari Indonesia (30% nya dari Aceh sementara dulu bisa mencapai 70%)

Bapak Iqbal, Direktorat Tenaga Kerja Bappenas

- Ada kegiatan Kemnaker terkait skill development center, barangkali ini bisa memenuhi kebutuhan nantinya khususnya untuk komoditas Nilam Aceh ini. Dalam praktiknya, kita melibatkan universitas dan lembaga pendidikan baik itu SMK, Politeknik, atau universitas termasuk dunia usaha juga untuk melaksanakan peningkatan kualitas tenaga kerja. Saat ini ada Piloting project di Aceh Tamiang
- Misalnya, di kemudian ada semacam kebutuhan upgrade keahlian petani Nilam dalam pengolahan, atau hal teknis yang perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, maka bisa saja ini dikerjasamakan melalui program kami yang ada di skill development center ini

Pak Syaifullah, Ketua ARC

- Dulu kami pernah mengadakan semacam seleksi untuk merekrut 20 orang untuk dilatih menjadi wirausaha muda dan ternyata peminatnya cukup banyak mencapai 5000 orang. Desain training dikelola oleh ARC dan pembiayaan tetap dipegang oleh dinas.
- Pada akhir pelatihan kita memberi alat produksi kepada kelompok yang dibentuk dan mereka sudah sudah bisa menciptakan sebuah produk. Sampai sekarang mereka yang 20 orang ini masih aktif berjualan. Konsep pelatihan yang mereka ikuti sudah cukup bagus
- Sejauh ini pelatihan tidak gol, misal pelatihan di hotel tapi hanya terselenggarakan acaranya saja, mereka tidak melaksanakan usaha secara sungguh-sungguh dan hanya terkesan untuk mengikuti pelatihan saja dan ini menjadi PR kita bersama. Maka desain pelatihan yang efektif seperti ini perlu di desain oleh Disnaker supaya ke depan bisa menghasilkan lebih banyak lagi pengusaha pengusaha muda yang akan lebih berdampak pada perekonomian

Bapak Iqbal, Direktorat Tenaga Kerja Bappenas

- Kegiatan terkait wirausaha ataupun pelatihan yang diberikan nantinya bisa dikerjasamakan dengan Unsyiah misalkan untuk memberikan pelatihan kepada petani dalam peningkatan kapasitas ataupun vokasional lainnya yang nanti sesuai dengan kebutuhan di lapangan seperti apa bisa dikerjasamakan melalui pelatihan yang ada ini

Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Bappenas

- Untuk koordinasi tingkat daerah memang diperlukan dan akan dirumuskan Bagaimana mekanisme koordinasi tingkat teknis di daerah supaya berjalan efektif. Koordinasi di tingkat provinsi/daerah memang perlu diperlukan, secara internal akan dilakukan pembahasan terlebih dahulu mengenai bagaimana langkah kedepannya step by step yang akan dilaksanakan

Tagging RO

1. Kemenperin

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Aceh (24 Agustus 2021)
1	Industri Aneka Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	4.900	98	Industri	Pusat	Kemenperin	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitasi Pemasaran	
2	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	12.500	192	Industri	Pusat	Kemenperin	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Sarana dan Prasarana Produksi	

3	<p>Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan</p>	9.000	161	Industri	Pusat	Kemenperin	<p>Penyediaan Akses Bahan Sarana Baku dandan Prasarana Ruang/Alat Produksi Bersama</p>	<p>Sarana Prasarana Produksi</p>	<p>Bisa diskusi dengan dirjen IMA, Strukturisasi peralatan menggunakan proposal yang diajukan oleh dinas. Kebutuhan: mesin penyulingan daun menjadi minyak menggunakan system boiler hemat energi menggunakan stainlesssteel. Alat penyaring dari drum diproses lebih lanjut dengan proses bubbling agar bisa langsung diekspor Untuk UKM: Perlu alat pencampur, pengaduk, dsb. Ibu Lusiana: Untuk sarpras diperuntukkan untuk IKM. Dit. IPEK: - 2 mekanisme restrukturasi: DAK dan APBN. DAK 2018 dan 2019 sudah pernah dapat untuk IKM nilam namun secara rincian kegiatan hanya rincian Gedung, tidak mengajukan mesin</p>
---	---	-------	-----	----------	-------	------------	--	----------------------------------	--

dan peralatan. DAK 2022 ada di Kab. Aceh Jaya saat ini masih dalam proses simoni. Nilam tidak mengajukan sarpras, hanya pematangan lahan dan pemabngunan Gedung.

- Mekanisme yang digunakan adalah cost sharing. Diajukan untuk IKM yang sudah memiliki NIB. Pembiayaan sebesar 25-40% bisa dibiayai oleh kemenperin.
- Ada kegiatan sertifikasi, salah satunya JMP.
- IKM juga ada DAK Non Fisik. Jika nanti hasil simoni diterima, bisa dilanjutkan dengan DAK non fisik
- Lokasi belum bisa diidentifikasi karena pagu anggaran masih berproses, namun akan

dilaksanakan di 34 prov.

Pak Syaifullah:

- **DAK SIKIM** Nilam peremncanaan dibuat ARC 2018 dan 2020 diterima. Saat ini sudah dibangun. Ada Gedung untuk warehouse, space untuk IKM, dan mesin penyulingan 1 unit, instrument pemeriksaan kualitas minyak.
- Untuk ekspor: connecting dengan entitas luas (market).
- Sertifikasngat penting karena sebagian besar IKM tidak punya sertifikat BPOM, dinkes, dan izin yang lainnya.
- Perlu sosialisasi perizinan
- Perlu pelatihan spesifikasi yang dibutuhkan oleh dunia industry, contohnya

komposisi/formulasi
i parfum di Prancis.

Pak Ari:

- IKM adalah bagian dari UMKM, hanya berbeda klasifikasinya. Yang dibutuhkan juga sama, seperti sertifikasi dsb.

Bu Lusiana:

- Link -> Memfasilitasi pertemuan IKM dengan industry besar (PJ: Dirjen IKMA)

IPEK:

- Bisa ditindaklanjuti dengan dinas (mengajukan proposal untuk pengembangan nilam) sehingga kemenperin bisa mengidentifikasi intervensi mana yang perlu dilakukan dahulu.

Pak Helvizar:

- Untuk pengajuan biasanya di Bappeda

- Kendala legalitas menjadi masalah penting bagi UMKM, perlu rumah kemasan agar cost lebih murah, saat ini masih dilempar ke surabaya, dll.

IPEK: rumah kemasan difasilitasi melalui DAK, dan sudah diajukan di Kab. Aceh Jaya.

4	Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitas	8.215	14	Kelompok Masyarakat	Pusat	Kemenperin	Penyediaan Akses Bahan dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Sarana dan Prasarana Produksi	
5	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	2.707	44	Industri	Pusat	Kemenperin	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitas Pemasaran	
6	Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	6.850	20	Industri	Pusat	Kemenperin	Penyediaan Akses Bahan dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Sarana dan Prasarana Produksi	
7	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	5.500	28	Industri	Pusat	Kemenperin	Penyediaan Akses Bahan dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Sarana dan Prasarana Produksi	

2. Kemnaker

Dit. Naker Bappenas:

Program Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan bekerja sama dengan universitas. Jika dimungkinkan, dapat dibentuk workplace untuk pengolahan hasil dari nilam.

Program pelatihan dengan bantuan 40jt/kelompok.

Ada RO peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk mendukung MP

Pak Syaifullah:

Pernah ada kegiatan pelatihan entrepreneur muda dengan kapasitas 20 orang dengan kerja sama dengan dinas tenaga kerja. ARC membuat desain kegiatan pelatihan, dan outputnya membentuk startup dan alat produksi untuk kelompok tersebut.

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Aceh (24 Agustus 2021)
1	Tenaga Kerja Mandiri Pemula	200.000	40.000	Orang	34 Provinsi (Pusat)	Kemenaker	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	Mendukung MP
2	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri Pemula	80.000	40.000	Orang	34 Provinsi (Pusat)	Kemenaker	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	Mendukung Mp
3	Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan	27.000	1.800	Orang	34 Provinsi (Pusat)	Kemenaker	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	Mendukung MP
4	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan	6.570	1.800	Orang	34 Provinsi (Pusat)	Kemenaker	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	Mendukung MP

3. Kementan

No	RO	Alokasi (Rp Juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Aceh (24 Agustus 2021)
----	----	-------------------------	--------	--------	--------	------------------	------------------	--------------------	---

1	Wirausahawan Muda Pertanian	21.620	765	Kelompok Masyarakat	Kota Medan, Kab. Banyuasin, Kota Bogor, Kab. Magelang, Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kab. Tangerang, Kab. Kupang, Kota Banjarbaru, Kab. Gowa, Kab. Manokwari	Kementan	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	<p>Untuk lokasi Aceh belum ada. Mungkin bisa diusulkan kembali lokasinya di internal kementan.</p> <p>RO berada di Program Pendidikan pertanian, kegiatan penguatan Pendidikan pertanian</p> <p>Akan didiskusikan kembali kegiatan/RO/Program Kementan yang bisa mendukung minyak atsiri</p> <p>Pak Dading:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pembibitan yang baik - Terkait struktur petani bisa dimasukan untuk mendukung MP <p>Pak Ari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementan bisa focus untuk mensupport pembibitan <p>Pak Syaifullah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah bisa disiapkan instalasi air ke
---	-----------------------------	--------	-----	---------------------	--	----------	-----------------------	------------------------	---

lahan,
infrastruktur
pembuatan
kompos dari
sampah nilam
(mesin
pencacah dan
kelembagaan)

- Perlu program kebun induk agar bisa pembibitan disertifikasi
- Apakah mesin penyulingan bisa disupport dengan inovasi (perlu konfirmasi ke kemenperin)

Ibu Mena:

- Kegiatan benih (on farm) bisa di kementerian pertanian di dirjen perkebunan, tanaman penyegar (ess II)
- Terkait infrastruktur, bisa bekerja

sama dengan
dirjen
prasarana dan
sarana
pertanian,
dirjen PSP,
dirjen
perkebunan
(kebun induk)

- Untuk
BPPSDMP
kegiatannya
bentuk
penyuluhan,
Pendidikan
vokasi,
pendampingan,
nantinya atsiri
bisa
dimasukkan ke
kurikulum

Pak Erwin:

- Yang
dilaksanakan
terkait PWT
mengikuti
komoditas
utama yg ada di
kementerian
pertanian. Dari
Renja
kementan,
dirjen

perkebunan
ada kegiatan
utama (perlu
dikonfirmasi
kembali apakah
nilam
merupakan
supporting ke
arah pangan):
Dukungan
logistic unggul,
Pengembangan
komoditas
unggul (kopi,
kakao, tebu)
- BBPSDMP
hanya
peningkatan
kapasitas, perlu
koordinasi
dengan dirjen
lain
Ibu Elfitri Roren
Kementan:
- Nilam belum
masuk ke
kementan
karena
komoditas yang
diusulkan untuk
MP adalah kopi.
Jika ada
bantuan akan

masuk ke
reguler tidak
masuk ke lokasi
Kawasan.

- Pengairan:
dirjen PSP
- Jika komoditas
nilam strategis,
bisa diajukan
kembali ke
pusat. Jika ada
perubahan
Kawasan akan
ditampung
(diusulkan lgsg
ke dirjen
perkebunan).
Yang
mengusulkan
adalah dinas
pertanian. Jika
tidak masuk
kawasan
prioritas
nasional, bisa
masuk ke
Kawasan
prioritas
prov/kab.

4. Kemendag

No	RO	Alokasi (RP juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Aceh (24 Agustus 2021)
1	Fasilitasi Pengembangan Merek	1.000	25	Badan Usaha	Belum ditentukan	Kemendag	Kurasi dan Standardisasi Produk	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi	
2	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	750	200	Badan Usaha	Belum ditentukan	Kemendag	Kurasi dan Standardisasi Produk	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi	
3	Fasilitasi Sertifikasi Produk Ekspor	3.250	40	Badan Usaha	Belum ditentukan	Kemendag	Kurasi dan Standardisasi Produk	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi	
4	Pengembangan Desain melalui Indonesian Design Development Center	4.500	100	Produk	Jakarta	Kemendag	Kurasi dan Standardisasi Produk	Kurasi Unggulan Produk	
5	Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar	5.000	1500	UMKM	5 Provinsi (Pusat)	Kemendag	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Kemitraan Usaha	P3DN Pak Rozak: - Kegiatan kemitraan, mempertemukan UMKM dengan ritel/perhotelan. Sudah menjalin MOU dengan beberapa daerah terkait

kebutuhan sandal hotel.

- Memfasilitasi kegiatan dengan market place
- Kemendag sudah melakukan MoU dengan hotel agar UKM sandal bisa memenuhi kebutuhan hotel. Kemendag akan mencoba memfasilitasi UKM sabun dengan perhotelan
- Untuk lokasi, akan didiskusikan agar lokasi bisa ditagging di Aceh

Pak Syaifullah:

- Produk nilam sangat potensial, IKM bisa memproduksi sabun untuk didistribusikan ke hotel dengan catatan hotel

memberikan syarat2 produk yg digunakan

- Perlu adanya trobosan untuk memutus lingkaran channel kenalan.
- Sudah banyak inudstri besar, namun bentuknya trading (beli dari petani-ekspor) namun terjadi masalah harga tidak stabil. Nilai tambah sangat sedikit.
- Replikasi sangat mungkin dilakukan di wilayah lain.
- Alasan trading: resiko di industry farming sangat tinggi dan lebih rumit, sehingga pengusaha lebih memilih jual-beli daripada investasi.
- Kapasitas produksi sudah

									meningkat. 1500ton dari Indonesia, 30% dari Aceh, kebutuhan dunia puluhan ribu ton sedangkan kebutuhan dunia 1700 ton.
6	Promosi Makanan dan Minuman Sehat Nusantara	5.000	1	Promosi	Jakarta	Kemendag	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitasi Pemasaran	
7	Export Coaching Program	6.329	300	UMKM	Semarang, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Mataram, Denpasar, Pekanbaru, Medan, Pontianak, Serang	Kemendag	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitasi Pemasaran	
9	Fasilitasi Bantuan Sarana Usaha Perdagangan	10.000	500	UMKM	20 Provinsi (Pusat)	Kemendag	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitasi Pemasaran	Belum ada keterkaitan lgsg, karena saat ini kegiatannya berupa perbaikan warung, toko
12	Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan	2.000	1.000	UMKM	6 Provinsi (Pusat)	Kemendag	Pendampingan SDM UMKM	Literasi Digital dan Non-Digital	Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya sertifikasi, kemasan produk sehingga bisa bersaing

										sesuai SNI. Ada target UMKM yang diikutsertakan. Aceh diusulkan untuk dapat mengikuti program kewirausahaan dan kemitraan.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--